

**Kajian:
Pembelajaran PPKn****RESPON GURU BIDANG STUDI PPKn TERHADAP TERBENTUKNYA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)**

(Studi: Guru PPKn Tingkat SMA Sekecamatan Bagan Sinembah)

¹AGUS ANJAR; ²VOLVO SIHOMBING

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Labuhanbatu

Akademik Managemen Ilmu Komputer (AMIK) Labuhanbatu

Email: agus_anjar.msi80@yahoo.co.id; volvolumbantoruan@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang telah tegas dalam memberikan tugas fungsi tenaga pendidik terkhusus guru PPKn dalam memberikan materi yang berhubungan dengan kenegaraan, namun disini lain perlu panambahan guna mempertahankan ideolgi tersebut, diantara pembentukan BPIP hal ini bertujuan guna mengembalikan jati diri bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan yang paling terpenting adalah tidak bergesernya akan nilai-nilai Pancasila yang mungkin dapat meluas kedaerah-daerah lain. Bagaimana penegakkan ideologi suatu bangsa agar tetap berdiri? Bagaimana aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mempertahankan ideologi Pancasila? Apakah terjadi tumpang tindih perihal tugas dan fungsi antara guru PPKn dengan BPIP? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Maka teknis yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara mendalam guna mendapatkan informasi tentang pandangan guru PPKn setingkat SMA di Kecamatan Bagan Sinembah dengan jumlah responden (guru) sebanyak 11 orang. Maka berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung yang kemudian dianalisa, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: guru yang mengampu mata pelajaran PPKn tidak memberikan dukungan terhadap terbentuknya BPIP dikarenakan hal ini hanya kepentingan kelompok saja dalam arti terbentuknya BPIP tidak mewakili seluruh elemen masyarakat (lapisan masyarakat), akan tetapi lebih menitik beratkan kepada beberapa golongan saja sehingga terkesan kental akan nuansa politiknya.

Kata Kunci: *BPIP, Guru PPKn, Ideologi*

Kajian:**Pembelajaran PPKn****Pendahuluan**

Awalnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang diketuai oleh Abdul Latif dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2017, yang kemudian beralih nama menjadi BPIP pada tahun 2018.

Kita ketahui bahwa tahun 2018-2019 adalah tahun politik semua aktifitas masyarakat mulai dari hal terkecil sampai hal terbesar semuanya menjadi perhatian skala nasional. Hal ini tidak luput peran dari media sosial yang begitu pesat, sehingga berimplikasi terhadap suhu perpolitikan Indonesia yang menambah hangat.

Kegiatan massa yang begitu besar mulai dari pemilihan umum DKI.1 sampai kepada reuni 212 yang dijalankan oleh sebagian besar masyarakat terkhusus umat Islam, hal ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Sorotan-sorotan negatif dari kelompok yang tidak mendukung seperti reuni 212 memberikan penilaian bahwa ada sebagian masyarakat Indonesia yang intoleran, tidak Pancasila, tidak berbhineka dan lain sebagainya. Efek dari itu semua lahirlah sebuah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang perlu segera dibentuk guna mempertahankan ideologi Pancasila. Namun niat baik dari pemerintah dengan membentuknya BPIP menimbulkan multi tafsir dari kalangan masyarakat luas, bahkan dunia pendidikan terutama dari guru-guru yang mengampu mata pelajaran PPKn. Mengapa? munculnya BPIP tak lain adalah untuk mengingatkan dan mengembalikan bahwa ideologi Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan kesepakatan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi publik, bukankah guru yang mengampu mata pelajaran PPKn di

lingkungan sekolah sudah cukup untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila?

Dari sinilah peneliti tertarik untuk menemukan jawaban tentang pandangan guru yang mengampu mata pelajaran PPKn di lingkungan sekolah tingkat SMA. Dari latar belakang tersebut peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul *“Respon Guru Bidang Studi PPKn terhadap Terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Studi: Guru PPKn Tingkat SMA Sekecamatan Bagansinembah.*

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakkan ideologi suatu bangsa agar tetap berdiri?
2. Bagaimana aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mempertahankan ideologi Pancasila?
3. Bagaimana respon guru PPKn ditingkat SMA Kecamatan Bagansinembah, dengan terbentuknya BPIP?

Kajian Pustaka

Pandangan Althusser dalam dua tesis tentang ideologi mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa: Tesis **pertamanya** mengatakan bahwa ideologi itu adalah representasi dari hubungan imajiner antara individu dengan kondisi eksistensi nyatanya. Apa yang direpresentasikan di situ bukan relasi riil, tapi relasi imajiner antara individu dengan suatu keadaan di mana mereka hidup didalamnya. Tesis **kedua** mengatakan bahwa representasi gagasan yang membentuk ideologi itu tidak hanya mempunyai eksistensi spiritual, tapi juga eksistensi material.

Althusser menyatakan bahwa sejarah ideologi ada sejak manusia lahir. Bentuk ideologi adalah harapan, cita-cita, ilusi,

Kajian:**Pembelajaran PPKn**

mimpi, atau muncul dari alam bawah sadar. Di sini Althusser memakai teori alam bawah sadar Freudian. Oleh karena itulah ideologi bersifat imajiner berkaitan dengan kondisi riil manusianya. Kemudian Althusser memakai pendekatan ideologi dari sisi sosial manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, berinteraksi, berkelompok. Disinilah ideologi memiliki eksistensi material.

Ideologi selalu bersifat menginterpelasi (memanggil) individu menjadi subjek (individu yang melakukan pekerjaan) kongkrit dalam kesehariannya. Individu karena pengaruh ideologinya, mewujudkan diri sebagai subjek kongkrit mengikuti apa yang diinginkan oleh ideologi. Dalam situasi demikian, semua individu atau subjek tenggelam pada ideologi. Konsep ideologi Althusser menjadi terkenal dan menarik ketika dikaitkan dengan negara, relasi penguasa dengan yang dikuasai. Althusser menyebutkan dua mekanisme utama penguasa menguasai dan memungkinkan warga sebuah negara tunduk dengan aturan-aturan yang berlaku, yakni represif dan ideologis. Kedua dimensi ini erat dengan eksistensi negara sebagai alat menguasai.

Althusser membedakan antara perangkat negara yang represif dengan sebutan *RSA (repressive state apparatus)* dan *ISA (ideological state apparatus)* sebagai perangkat yang ideologis. *RSA* mekanisme kerjanya memaksa, bentuknya seperti pengadilan, penjara ataupun militer. *ISA* mekanisme kerjanya halus, bentuknya seperti pendidikan, keluarga, media, ormas, parpol. Kedua perangkat ini mempunyai fungsi yang sama yaitu melanggengkan kekuasaan penguasa terhadap warga yang dikuasainya.

Althusser tidak berniat untuk membebaskan manusia dari ideologi. Baginya, setiap orang berperan menyebarkan ideologi dan menjadikan masyarakat ideologis. Ideologi-ideologi itu terbina lewat banyak hal seperti, mitos, agama, interaksi sosial. Ideologi merupakan semacam perekat bagi bersatunya anggota-anggota masyarakat. Inilah sisi positif dari ideologi, di samping itu ideologi juga merupakan reaksi terhadap suatu dominasi.

Selanjutnya Althusser membedakan dua konsep tentang ideologi;

1. *Repressive State Apparatus (RSA)* dan *Ideological State Apparatus (ISA)*. *RSA* lebih menunjuk pada aktor-aktor yang berperan penting menginterpretasikan sekaligus mengaplikasikan ideologi antar sesama manusia. Pada aspek ini, Althusser memandang *RSA* sebagai pemilik kuasa represif untuk dengan tegas menerapkannya pada setiap warga negara. *ISA* mengarah pada ideologi itu sendiri yang masuk ke dalam setiap kehidupan manusia. Ideologi ini terangkum dalam aspek keagamaan, pendidikan, hukum, keluarga, politik, komunikasi, serta moralitas.
2. Pada sisi ini, Althusser menekankan sisi produksi dan reproduksi material dalam ideologi. Produksi tidak mungkin ada tanpa reproduksi karena proses pembentukan memerlukan sesuatu untuk dibentuk. Hubungan antar manusia menjadi basis penting dalam ideologi, bukan hanya sekedar pemilik modal dan buruh, melainkan juga antara pemilik kuasa ideologis dan sasaran ideologis itu sendiri. Setiap ada proses produksi ideologis, maka disitu pula ada reproduksi ideologis yang digunakan

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

untuk melanggengkan ideologi itu sendiri.

Dengan demikian, bukan hanya sikap antar manusia yang menjadi fokus dari ideologi, melainkan juga tatanan sosial yang terus-menerus membentuk ulang ideologi itu. Althusser menyebutnya sebagai overdeterminasi guna mengatasi ketunggalan esensi ekonomi dalam ideologi. Proses produksi dan reproduksi memang berasal dari aspek ekonomi, namun dalam perkembangannya, ideologi menjadi suatu esensi otonom yang bukan hanya merengkuh sisi ekonomi, namun juga sosial budaya. Proses ekonomi ini memang tidak langsung terungkap dalam ideologi atau kesadaran, melainkan muncul sebagai akibatnya dalam bentuk realitas sosial akan gagasan-gagasan.

Dalam ideologi, sangat sulit untuk membedakan apakah aktor ideologis itu berperan dalam proses produksi dan reproduksi dalam kerangka kesadaran palsu atau ketidaksadaran. Meskipun demikian, kedua hal tersebut sangat berhubungan dan dapat ditelusuri lebih lanjut. Ideologi melihat individu dan tatanan sosial dalam kerangka subjek sekaligus objek. Tidak seperti pandangan subjek terhadap objek menurut Sartre, ideologi memandang individu sebagai objek untuk menjadi subjek. Hal ini dikarenakan proses produksi dan reproduksi yang selalu berjalan sekaligus. Ketika individu menerapkan suatu ideologi kepada yang lain, ia pasti telah menginternalisasi ideologi dari yang lain sebelumnya. Dalam hal ini, ideologi membangkitkan individu untuk menjadi subjek dengan sekaligus mengobjekkannya layaknya barang produksi dan reproduksi. Kesadaran subjek dalam subjektivitas pun dipertanyakan demikian pula dengan objektivitas. Subjek mungkin saja sadar

dengan apa yang dilakukannya adalah dalam tatanan ideologis, namun itu adalah kesadaran palsu karena ia tidak sadar telah masuk dalam tatanan ideologis itu sendiri dengan menjadi objek. Tidak ada yang dominan maupun tidak dominan karena ideologi telah masuk sekaligus keluar dari individu.

Ide tentang kesadaran dari para eksistensialis menjadi dipertanyakan karena baik *le regard* menurut Sartre dan cinta kasih menurut Marcel adalah ideologi itu sendiri. Sartre sangat terpengaruh oleh kondisi keluarga dan lingkungannya yang mengabaikan dirinya sehingga ia menganggap orang lain sebagai neraka bagi dirinya. Demikian pula dengan Marcel, bahwa meskipun cinta kasih itu ada dalam setiap diri manusia, namun ia tidak dapat mengelak bahwa pemikirannya sangat dipengaruhi oleh konteks agama Katolik. Sartre dan Marcel mengatakan bahwa eksistensi manusia adalah menemukan realitas dirinya sendiri. Pada kenyataannya, realitas diri adalah kompleksitas berbagai tatanan ideologis yang membentuknya. Manusia tidak akan mungkin menemukan dirinya sendiri secara utuh karena ia pasti dibentuk dan sekaligus membentuk perbuatan individu lain. Bahkan jika ia menolak suatu ideologi, ia pun akan memunculkan suatu ideologi baru yang terlihat dalam proses reproduksi.

Ideologi, menurut Althusser, adalah representasi imajiner antara individu dan kondisi nyata. Representasi ini adalah materi inderawi ataupun bukan yang membentuk dasar pengambilan keputusan seseorang. Pada sisi ini, manusia telah kehilangan eksistensinya karena ia secara tidak sadar (ataupun sadar secara palsu) telah menginternalisasi ideologi di dalam dirinya.

Kajian: Pembelajaran PPKn

Kalaupun manusia sadar dalam mengambil keputusannya yang didasarkan atas tatanan ideologis lalu menelusurinya, ia pun akan menemukan bahwa titik awalnya juga adalah ideologi. Maka bisa dikatakan ia sebenarnya tidak sadar didalam pengambilan keputusannya karena ia sudah dikuasai oleh ideologi. Dari sisi negara, hal ini pun sama karena pada dasarnya negara adalah represif menurut Althusser. Sikap represif negara itulah yang melanggengkan proses internalisasi ideologi ke masyarakat. Karena negara dianggap sebagai representasi publik dalam sebuah konsensus imajiner, individu pun harus patuh akan tindakan negara. Pada titik inilah RSA juga mencerminkan ISA, bahwa ada keterkaitan erat antara tindakan represif dan ideologi represif itu sendiri. Adanya kepatuhan dari warge negara ke negara bukan semata-mata demi kepentingan publik, namun lebih kepada doktrin ideologis yang pelan-pelan dan secara terus menerus disuntikkan oleh negara.

Ideologi merupakan sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial dalam kehidupan (Gustin, LP3 UMY, 2003; 123)

Dalam jurnal (Imam Mawardi, vol 1: 41) mengemukakan Mengenai Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika*, maka jelas pancasila adalah sebuah landasan yang di buat sebgai tujuan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu di setiap perbedaan. Pancasila sebagai acuan dalam setiap langkah bertindak dan mengambil keputusan. Bentuk imflementasi, salah satunya adalah seorang pemimpin yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk

mengatur dan mengayomi masyarakat atau golongan, dan berbagi latar belakang yang berbeda ras, suku, budaya dan agama yang hidup di indonesia, di haruskan memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, untuk menciptakan sebuah perubahan yang baik dan sejahtera bagi bangsa dan negara.

Selanjutnya Hariyono (2014) dalam Jurnal Ambiro Puji (vol.1 no. 2: 112) mengemukakan idiologi pancasila dalam pemikiran radikakal dan revolusioner, perlu kita renungkan, pancasila sebagai dasar Negara diwarnai oleh ketegangan, konflik dan consesus bersama. Para Pendiri bangsa berhasil keluar dari rutinitas pandangan hidup bangsanya melalui penalaran dan kontemplasi yang brilyan.

Sedangkan Natal Kristino dalam jurnalnya (vol. 2 no. 2:1911) mengemukakan Pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan pancasila perlu diberikan disetiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Pendidikan pancasila sebagai pendidikan kebangsaan berangkat dari keyakinan bahwa pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara indonesia indonesia tetap mengandung nilai dasar yang relevan dengan proses kehidupan dan berkembang dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

memiliki landasan eksistensial yang kokoh, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

Selanjutnya menurut Hariyono (2014), mengemukakan bahwa kepentingan bangsa dan Negara selalu menempati posisi yang dominan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar Negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa.

Menurut (Taniredja & Haryono, 2014:7), mengemukakan Pancasila mempunyai peranan penting sebagai pembentuk karakter seorang pemimpin di Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila maka pemimpin yang ideal bagi masyarakat, rakyat dan golongan.

Menurut (Muchtar, 2016:122), mengemukakan kemudahan dalam pembentukan dan menjalankan negara maka Pancasila berfungsi sebagai Ideologi Negara yang di gunakan oleh Penyelenggara Negara untuk menjalankan organisasi Negara.

Sedangkan BPIP itu sendiri bersandar kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018, dengan pertimbangan dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1941, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

2. Bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;
3. Bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat efektif menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (<http://www.informasiguru.com/2018/04/bpip.html>).

Metode Penelitian**a. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2019 sampai dengan selesai. Adapun tempat penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Bagan

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

Sinembah Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan fokus penelitian pada sekolah SMA Sederajat.

b. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2011:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Moelong (2012:6) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif dalam penyajian ini lebih kepada kata-kata, kalimat atau gambar, juga berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi atau memo. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Jadi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena pada dasarnya penelitian ini menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut, yaitu mengenai Pandangan guru PPKn yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah dengan adanya pembentukan BPIP.

Suharsaputra (2012:9) menyatakan penelitian kualitatif secara umum sering diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif naratif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk kemudian dijelaskan baik dalam perspektif

emik (sudut pandang subjek penelitian) maupun etik (sudut pandang peneliti).

Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mejlis guru yang mengampu mata pelajaran PPKn tingkat SMA. Selanjutnya untuk tahap analisa data peneliti menggunakan tehnik analisa data deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data dari sekolah kemudian ditarik kedalam sebuah kesimpulan.

Pembahasan**Pandangan guru PPKn**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan badan yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

Jika kita merujuk tugas dan fungsi seorang guru adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, dari yang tidak mengetahui menjadi mengetahui. Dengan demikian anak didik tersebut menjadi bertambah ilmu pengetahuannya. Pemberian ilmu pengetahuan yang dimaksud peneliti disini adalah, memberikan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila yang disampaikan guru yang mengampu mata pelajaran PPKn di lingkungan Kecamatan Bagan Sinembah, dengan jenjang pendidikan SMA.

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung peneliti mendapatkan data bahwa, pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilantik oleh Presiden Jokowi memberikan banyak pandangan dari kalangan guru PPKn ditingkat SMA diantaranya adalah; pembentukan BPIP hanya menghambur-hamburkan anggaran negara.

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

Ideologi Pancasila bagi Indonesia sangat penting karena merupakan jati diri masyarakat Indonesia, hal ini merupakan kesepakatan yang telah disetujui dari berbagai kelompok. Namun yang menarik dan menjadi perhatian penulis adalah, apakah terbentuknya BPIP ini disebabkan kurang mampunya guru PPKn dalam memberikan pemahaman tentang Pancasila? hasil dari wawancara dan pengamatan dilapangan bahwa mayoritas guru yang mengampu mata pelajaran PPKn setingkat SMA adalah mampu dalam memberikan edukasi kepada anak didik dan bersedia menjawab pertanyaan jika ada dari kalangan masyarakat. Fungsi guru jika merujuk kepada Sadirman (2001:123) Guru adalah salah satu komponen manusia dalam proses belajar mengajar, yang ikut serta dalam usaha pembentukan Sumber Daya Manusia yang potensial bidang pembangunan. Oleh karena itu guru merupakan salah satu unsur dibidang kependidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukan sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.

Jika guru yang mengampu mata pelajaran seluruhnya merasa mampu dalam memberikan pemahaman Pancasila, maka kurang tepat dibentuknya sebuah badan yang menangani tentang ideologi. Dari jawaban beberapa responden memberikan penjelasan bahwa, pembentukan BPIP ini terkesan sia-sia disebabkan sudah ada guru yang mengampu tentang Pancasila itu sendiri. Sebagaimana amanat pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional berfungsi untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Berdasarkan kunjungan beberapa lembaga pendidikan, peneliti mendapatkan keterangan dari responden yang memberikan keterangan bahwa dilingkungan sekolah kami tidak memberikan mata pelajaran PPKn dalam ruang kelas, jadi siswa diberikan buku panduan guna mempersiapkan ujian negara nantinya, sehingga dalam proses belajar mengajar dikelas untuk pelajaran PPKn itu tidak ada.

Wawancara yang mendalam selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan apa pandangan Bapak ibu tentang pemerintah mendirikan BPIP? Maka data yang didapat dari majlis guru mengatakan bahwa, didirikan BPIP berdasarkan asumsi-asumsi yang sifatnya politik (menurut kepentingan beberapa pihak) bukan ingin mengembalikan nilai-nilai Pancasila murni.

Dari kunjungan beberapa sekolah ada yang memberikan pandangan bahwa terbentuknya BPIP itu kurang jelas kemana arah dan tujuannya. Dengan gaji yang luar biasa besar akan tetapi untuk mengukur tingkat keberhasilan tidak tampak. Jika terbentuknya BPIP murni kepentingan negara tanpa adanya *embel-embel* lain tentunya hal ini sangat mendapat respon dari masyarakat luas.

Kajian: Pembelajaran PPKn

Kesimpulan

1. Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung kesekolah dengan responden guru pengampu mata pelajaran PPKn didapat data bahwa untuk menjaga ideologi suatu bangsa diperlukan kebersamaan dalam menjaganya dengan diperkuat tali persaudaraan dengan penekanan terhadap guru-guru PPKn yang benar-benar mampu dalam menjunjung tinggi ideologi Pancasila kepada peserta didik sedini mungkin.
2. Aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mempertahankan ideologi Pancasila sudah terbukti dengan membentuknya BPIP
3. Terbentuknya BPIP memberikan dampak bahwa terjadinya tumpang tindih dengan tugas guru yang mengampu mata pelajaran PPKn SMA sederajat dikecamatan Bagansinembah.

Daftar Pustaka

- Althusser, Louis, 2001, *Lenin and Philosophy and other essays*, Monthly Review Press: New York, <http://ensiklo.com/2011/09/21/konsep-ideologi-dalam-perpektif-louis-althusser/> diakses tanggal 04 Juli 2019
- Gustin Efrianti dan Susena, Peningkatan Penguasaan Materi Ideologi dengan Metode Debat Kelompok di SMK Muhammadiyah 2 Bantul, Jurnal, Citizenship, Vol. 3 No.1, Juli 2003
- Hardiyana, Siti, Pengaruh Guru PPKn Terhadap Pembentukan Karakter Siswa, Jurnal Ilmiah PPKn IKIP Veteran Semarang, Vol 2 No 1 November 2014
- Hariyono. 2014. *Idiologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Malang, Intans Publishing
- Kaelan, Zubaida, Ahmad, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan, Untuk Perguruan Tinggi*, Berdasarkan SK Dirjen DIkti No. 43/2006, DOsen UGM, Paradigma, Yogyakarta
- Kristino, Natal, *Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UMNES, Vol. 2, No. 2, Januari 2016.
- Mawardi, Imam, *Pancasila Sebagai Landasan Karakter Pemimpin Menuju Perubahan Ideal*, STKIP PGRI Bangkalan, Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Hukum, Vol. 1, November 2017
- Moleong, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, S. A. 2016. *Idiologi Pancasila Kajian Filsafat Teori Politik dan Pendidikan*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Puji, Ambiro Asmaroini, *Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapan Bagi Masyarakat di era Globalisasi*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jurnal JPK: Jurnal Pancasila dan

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2,
Januari 2017.
file:///C:/Users/asus/Downloads/307-
111011-2-PB.pdf

Rokhmad, Abu, Penelitian Sosial
Keagamaan, Radikalisme Islam dan
Upaya Deradikalisasi Paham Radikal,
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,
Vol 20, No 1, 2012, UIN Wali Songo
Semarang

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitians
Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan
Tindakan*. Bandung : Refika
Aditama.

Taniredja, T & Haryono. M.Y, 2014.
Pemimpin *Berkarakter Pancasila*
Bandung: Alfabeta.

<http://www.informasiguru.com/2018/04/bpi>
p.html, diakses pada tanggal 3 Mei
2019, Pukul 14.01 Wib